



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO 53115
Telp. (0281) 636079, 636266 Telex. 25642 Fax. 635332

Nomor : 005/1040/2017

Purwokerto, 20 Maret 2017

Lampiran :

Kepada Yth. :

Perihal : UNDANGAN

Sebagaimana Daftar Terlampir

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami minta kehadiran Saudara hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan dengan ketentuan :

Hari / Tanggal : Rabu / 22 Maret 2017.

W a k t u : 09.00 WIB s/d Selesai.

T e m p a t : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

A c a r a : Sosialisasi Penyusunan RKBMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS



Ir. SUMADYO DJOKO SUTANDAR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650222199103 1 002

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Arsip (Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas).

Lampiran surat Kepala BKD Kabupaten Banyumas
Nomor : 005/1040/2017
Tanggal :
Perihal : UNDANGAN - 20 Maret 2017


DAFTAR UNDANGAN :

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris Dewan
3. Kabag Umum
4. Kabag Pembangunan
5. Camat Purwokerto Utara
6. Camat Purwokerto Selatan
7. Camat Purwokerto Barat
8. Camat Purwokerto Timur

DINAS/BADAN/KANTOR

1. Inspektur Kabupaten Banyumas
2. Para Kepala OPD Kabupaten Banyumas :
 - Kepala Dinas Pendidikan
 - Kepala Dinas Kesehatan
 - Kepala Dinas Perhubungan
 - Kepala DINDUKCAPIL
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Perikanan dan Peternakan
 - Kepala DINPERTAN KP
 - Kepala Dnas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - Kepala DINPORABUDPAR
 - Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Kepala DINPERKIM
 - Kepala DPPKBPP dan Perlindungan Anak
 - Kepala DINPERINDAG
 - Kepala DPMPP Terpadu Satu Pintu
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
 - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - Kepala BAPPEDALITBANG
 - Kepala Badan Keuangan Daerah
 - Kepala BPBD
 - Kepala SATPOL PP
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
 - Direktur RSUD Banyumas
 - Direktur RSUD Ajibarang

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS


Ir. SUMADYO DJOKO SUTANDAR, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650222199103 1 002

DALAM KELOMPOK

- 1. Sekretaris Daerah
- 2. Kepala Dinas
- 3. Kepala Bidang
- 4. Kepala Subbidang
- 5. Kepala Seksi
- 6. Kepala Subseksi
- 7. Kepala Urutan
- 8. Kepala Urutan

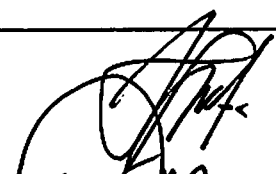

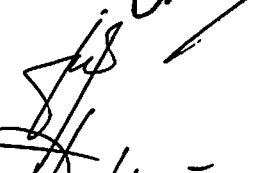
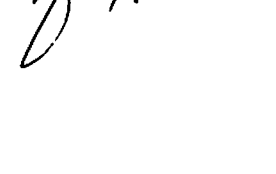


DAFTAR PUSTAKA

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
- 2. Peraturan Menteri Keuangan
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan
- 5. Peraturan Menteri Sosial
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 7. Peraturan Menteri Pertanian
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan
- 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 12. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 13. Peraturan Menteri Perekonomian
- 14. Peraturan Menteri Pertahanan
- 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 16. Peraturan Menteri Perindustrian
- 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 18. Peraturan Menteri Perdagangan
- 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 20. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi
- 21. Peraturan Menteri Sosial
- 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 23. Peraturan Menteri Pertanian
- 24. Peraturan Menteri Perhubungan
- 25. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 28. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 29. Peraturan Menteri Perekonomian
- 30. Peraturan Menteri Pertahanan
- 31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 32. Peraturan Menteri Perindustrian
- 33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 34. Peraturan Menteri Perdagangan
- 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 36. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi
- 37. Peraturan Menteri Sosial
- 38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 39. Peraturan Menteri Pertanian
- 40. Peraturan Menteri Perhubungan
- 41. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 42. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 44. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 45. Peraturan Menteri Perekonomian
- 46. Peraturan Menteri Pertahanan
- 47. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 48. Peraturan Menteri Perindustrian
- 49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 50. Peraturan Menteri Perdagangan
- 51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 52. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi
- 53. Peraturan Menteri Sosial
- 54. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 55. Peraturan Menteri Pertanian
- 56. Peraturan Menteri Perhubungan
- 57. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 58. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 59. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 60. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 61. Peraturan Menteri Perekonomian
- 62. Peraturan Menteri Pertahanan
- 63. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 64. Peraturan Menteri Perindustrian
- 65. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 66. Peraturan Menteri Perdagangan
- 67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 68. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi
- 69. Peraturan Menteri Sosial
- 70. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 71. Peraturan Menteri Pertanian
- 72. Peraturan Menteri Perhubungan
- 73. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 74. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 75. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 76. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 77. Peraturan Menteri Perekonomian
- 78. Peraturan Menteri Pertahanan
- 79. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 80. Peraturan Menteri Perindustrian
- 81. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 82. Peraturan Menteri Perdagangan
- 83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 84. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi
- 85. Peraturan Menteri Sosial
- 86. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
- 87. Peraturan Menteri Pertanian
- 88. Peraturan Menteri Perhubungan
- 89. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi
- 90. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
- 91. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 92. Peraturan Menteri Luar Negeri
- 93. Peraturan Menteri Perekonomian
- 94. Peraturan Menteri Pertahanan
- 95. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- 96. Peraturan Menteri Perindustrian
- 97. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 98. Peraturan Menteri Perdagangan
- 99. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 100. Peraturan Menteri Reformasi Birokrasi

ANALISIS
KEMENTERIAN
KABUPATEN
BAYUMAS
KEUANGAN DAERAH
BAYUMAS

DAFTAR HADIR

H A R I / TANGGAL : Rabu , 22 Maret 2017
 J A M : 09.00 Wib s/d Selesai.
 TEMPAT : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas
 A C A R A : Sosialisasi Penyusunan RKBMD berdasarkan Permendagri
 19 Tahun 2016


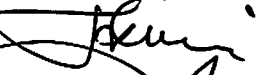


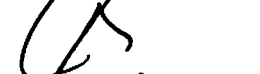








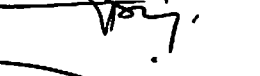
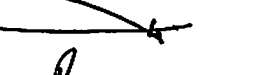



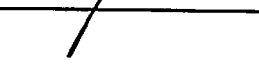
No	N a m a	J a b a t a n	Tanda Tangan
1	Ahmad Widi	Kes P2A	
2	Wahono S. Edi	KABID ASET	
3.	Sujono	Staf	
4.	Dedi Kuswabo	Ksb. Penatausahaan Aset	
5.	Furuyah	Staf ASET	
6.	Ryodi	---	

Purwokerto, 22 Maret 2017
 Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset


 HUMAM UDIN, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660516 198603 1 004

DAFTAR HADIR

H A R I / TANGGAL : Rabu , 22 Maret 2017
 J A M : 09.00 Wib s/d Selesai.
 TEMPAT : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas
 A C A R A : Sosialisasi Penyusunan RKBMD berdasarkan Permendagri
 19 Tahun 2016

No	N a m a	J a b a t a n	Tanda Tangan
1.	Siti Fauziah	Krb. Umum	
2	Suroto	staf	
3.	Sejatiwika	staf	
4	Suhartati	Krb. Umum	
5.	Sutanto	staf	
6	WARSITO	staf	
7	Suwarno	staf	
8	Iwan Haris y	---	
9	Selwin	staf	
10	roni	staf	
11	Sypanu	staf	
12	Vedy	staf	
13	Agus Eko D	staf	
14	Tulus	Kontributor	
15	IMDAR .S	KRB. Umum.	
16	Nartim	staf	
17	Roni Kiborog	Penyusun RKBMD	
18.	Alo Guburana	staf	
19.	Gamanjir Anur A	staf	

Purwokerto, 22 Maret 2017
 Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset


 HUMAMUDIN, SE
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660516 198603 1 004

DAFTAR HADIR

H A R I / TANGGAL : Rabu, 22 Maret 2017
 J A M : 09.00 Wib s/d Selesai.
 TEMPAT : Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kab. Banyumas
 A C A R A : Sosialisasi Penyusunan RKBMD berdasarkan Permendagri
 19 Tahun 2016

No	N a m a	J a b a t a n	Tanda Tangan
1.	Nuratri H	KKBBG Uluu Dinkannale	
2.	Puro-rani	Kreg Umum & Keres BKDD	
3.	Masripah	Karubbag Adm umum Inspektorat	
4	Hening L.	Peng Brig Dinkannale	
5.	Iswanfo	Staf	
6.	Iman Sunso	Staf (DPU)	
7	Tahidu	Dinaskep. Ukm.	
8.	Agus Suganto	UPKAS P3A	
9.	Supriyadi	Dinas permas des	
10.	Arif S.	DPMPTSP	
11	Mudari	Din dulceperit	
12	TRUSTIAWAN	- -	
13	ARIST BUBRIAN	ICERANPOL	
14.	Ruhito	Dupering	
15.	Sugary us	kec. kis umu	
16	paodjoko	dumperindag	
17	P. Suhendro	BBBD	
18.	Iman	- -	
19.	Dwi Apriyanto	Pengurus Barang kec. Pit. U	
20	IRNIDYA H	Ka-Inst Aset	

Purwokerto, 22 Maret 2017
 Kasubid Perencanaan dan Pemanfaatan Aset

HUMAM UDIN, SE
 Penata Tingkat I

NIP. 19660516 198603 1 004

Dokumentasi Rapat Pembahasan Sosialisasi Penyusunan RKBMD berdasarkan Permendagri 19 Tahun 2016



